

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer maka dapat disimpulkan bahwa:

Kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim tidak berpengaruh terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer, hal ini terlihat dari putusan pengadilan militer yang menjatuhkan vonis tidak jauh berbeda dari tuntutan oditur militer meskipun penasihat hukum yang menyandang pangkat lebih tinggi dari majelis hakim melakukan pembelaan-pembelaan di depan majelis hakim di dalam persidangan. Hakim militer tetap berpedoman dan berpegang pada pendiriannya sebagai penegak hukum yaitu tidak terpengaruh oleh pihak lain termasuk penasihat hukum terkait perkara yang diperiksa atau diputus olehnya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pengaruh kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer yaitu:

1. Merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan ditambahkan mengenai pengaturan kepangkatan penasihat hukum secara rinci mengenai kualifikasi untuk dapat beracara di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer agar dapat meminimalisir keraguan masyarakat terkait kualitas putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih, baik oleh Mahkamah Agung maupun MABES TNI kepada organ-organ pelaksana peradilan militer khususnya hakim militer, agar semakin dapat melaksanakan tugasnya khususnya mengenai pelaksanaan independensinya sebagai penegak hukum sehingga dapat memberikan kualitas putusan yang semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al. Wisnubroto, 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Amiroeddin Sjarif, 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie,dkk., 2013. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

Moch Faisal Salam, 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Suhrawardi K. Lubis, 2012. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rimdan, 2012. *Kekuasaan Kehakiman*, Kencana, Jakarta.

Tim Imparsial (Al Araf, dkk), 2007. *Reformasi Peradilan Militer*, Imparsial, Jakarta.

Website :

[http://nasional.kompas.com/read/2013/07/10/0830031/Denny.Indrayana.Diminta.Tak.](http://nasional.kompas.com/read/2013/07/10/0830031/Denny.Indrayana.Diminta.Tak.Intervensi.Sidang.Kasus.Cebongan)

[Intervensi.Sidang.Kasus.Cebongan](http://nasional.kompas.com/read/2013/07/10/0830031/Denny.Indrayana.Diminta.Tak.Intervensi.Sidang.Kasus.Cebongan)

<http://www.tni.mil.id/pages-22-kepangkatan.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepangkatan_Tentara_Nasional_Indonesia)

http://nasional.inilah.com/read/detail/2026589/inilah-vonis-tiga-terdakwa-utama-kasus-cebongan#.U3wpEvl_vXs

<http://id.wikipedia.org/wiki/Independen>

<putusan.mahkamahagung.go.id>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973 Tentang

Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Makalah pada Seminar, Konferensi, Simposium:

Mayjen Burhan Dahlan, *Mewujudkan Visi Peradilan Militer Yang Agung*.

Suparman Marzuki, *Peradilan Yang Fair Untuk Keadilan*.

Thesis:

Sarwo Edy, 1999, *Bekerjanya Peradilan Militer*, Universitas Diponegoro.

Eko Karyadi, 2011, *Implementasi Pemasyarakatan Narapidana Tentara Nasional Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Militer Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, Universitas Andalas.

Kamus:

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2014, Widya Karya, Semarang.